

# PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG 2016



# PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG 2016



# PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG 2016

Katalog : 4301003.3308  
No. Publikasi : 33080.1731  
Ukuran Buku : 14,8 x 21,0 cm  
Jumlah Halaman : vii + 55 Halaman

**Naskah:**

BPS Kabupaten Magelang

**Penyunting :**

BPS Kabupaten Magelang

**Gambar Kulit :**

BPS Kabupaten Magelang

**Diterbitkan oleh :**

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Dicetak oleh :**

TM Percetakan dan Advertising

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

# KATA PENGANTAR

Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2016 merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Magelang, yang memberikan gambaran umum tentang kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang. Data yang disajikan sebagian besar bersumber dari pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2015 dan 2016 yang dilengkapi dengan beberapa data sekunder dari instansi terkait.

Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2016 ini mengulas data pendidikan di Kabupaten Magelang berdasarkan indikator-indikator pendidikan yang terukur sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan perencanaan program dan kebijakan pembangunan daerah terutama di bidang pendidikan maupun bagi masyarakat luas.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran hingga terbitnya publikasi ini, diucapkan terimakasih. Diharapkan juga adanya kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan publikasi tahun berikutnya.

Kota Mungkid, November 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Magelang



Ir. Sri Wiyadi, M

# DAFTAR ISI

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                 | iii |
| DAFTAR ISI.....                     | iv  |
| DAFTAR TABEL.....                   | vi  |
| DAFTAR GAMBAR.....                  | vii |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....             | 2   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....     | 2   |
| 1.2 Tujuan .....                    | 5   |
| 1.3 Sistematika Penyajian .....     | 6   |
| BAB 2 METODOLOGI .....              | 8   |
| 2.1 Sumber Data .....               | 8   |
| 2.2 Metode Pengumpulan Data .....   | 8   |
| 2.3 Metode Analisis .....           | 9   |
| 2.4 Konsep dan Definisi.....        | 9   |
| BAB 3 PARTISIPASI PENDIDIKAN .....  | 21  |
| 3.1 Pendidikan Anak Usia Dini ..... | 23  |
| 3.2 Partisipasi Sekolah .....       | 26  |
| 4.3 Angka Partisipasi Sekolah.....  | 29  |
| 4.4 Angka Partisipasi Kasar .....   | 32  |

|  |    |
|--|----|
| 4.5 Angka Partisipasi Murni .....                          | 34 |
| BAB 4 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN .....                         | 37 |
| 4.1 Angka Melek Huruf .....                                | 38 |
| 4.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah .....  | 41 |
| 4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan .....             | 44 |
| BAB 5 SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN .....                | 48 |
| 5.1 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Guru .....             | 49 |
| 5.2 Rasio Murid Guru, Sekolah Murid dan Sekolah Guru ..... | 51 |
| PENUTUP .....  | 55 |

# DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 3.1  | Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2015-2016.. | 26 |
| Tabel 3.2  | Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2016...                                 | 29 |
| Tabel 3.3  | Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2016                                    | 30 |
| Tabel 3.4  | APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016.....   | 32 |
| Tabel 4.1. | Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2016.....                           | 42 |
| Tabel 4.2  | Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016.....        | 47 |
| Tabel 5.1  | Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016.....   | 52 |
| Tabel 5.2  | Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016.....   | 54 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 3.1 | Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah dan Kelompok Umur Tahun 2015-2016..... | 25 |
| Gambar 3.2 | Angka Partisipasi Kasar Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016.....  | 35 |
| Gambar 3.3 | Angka Partisipasi Murni Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016.....  | 36 |
| Gambar 4.1 | Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016.....                               | 41 |
| Gambar 4.2 | Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016 .....          | 45 |



# **B A B 1**

## **PENDAHULUAN**

A graphic consisting of three overlapping rectangular boxes with blue borders, stacked on top of each other. The top box is the largest and contains the title text. The middle and bottom boxes are slightly offset to the right and bottom, creating a layered effect.

# BAB 1 PENDAHULUAN

---

## 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, gender, dan lokasi geografis.

Pendidikan secara nasional berdasarkan Pancasila dengan tujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cita-cita luhur agar dapat menumbuhkan manusia pembangun yang dapat --membangun diri sendiri maupun pembangunan bangsa, terutama pembangunan di Kabupaten Magelang.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses, dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Demikian juga UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 5, ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat).

Dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium DevelopmentGoals (MDG's), sektor pendidikan telah disepakati bersama yang tertuang dalam tujuan kedua yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua. Adapun target yang ingin dicapai dalam MDG's sektor pendidikan tertuang dalam target ke-3 yaitu memastikan pada tahun 2015 semua anak, di mana pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Pada tanggal 25-27 September 2016 telah terjadi pertemuan akbar di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, yaitu *Sustainable Development Summit*, yang didalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. SDG's merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDG's. MDG's sudah dijalankan sejak September 2000 dan berakhir pada tahun 2015.

*Sustainable Development Goals* (SDG's) memiliki 17 tujuan global (*Global Goals*). Tujuan di bidang pendidikan berada di tujuan nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Maksud dari pendidikan berkualitas tujuan SDG's yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

Akses pendidikan yang berkualitas menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan dalam lima tahun mendatang. Akses pendidikan menjadi isu besar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Komponen kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan aksesnya. Dalam lima tahun terakhir diketahui bahwa kendala terbesar yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah masih kentalnya kesenjangan antar wilayah dalam hal akses. Mulai dari

persoalan perbedaan tingkat perkembangan daerah, hingga tingginya perbedaan kualitas pendidikan yang diakses.

Latar belakang dari penulisan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data pendidikan dengan mendeskripsikan angka-angka statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk membuat angka-angka tersebut menjadi lebih menarik dan mudah dibaca oleh para pengguna data dan pada akhirnya dapat dipahami khususnya oleh para pengambil keputusan serta oleh masyarakat luas

## **1.2 Tujuan**

Secara umum penulisan Publikasi Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2016 ini bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan serta kondisi pendidikan yang telah dan sedang dicapai oleh masyarakat di Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya agar lebih dipahami oleh para pemakai data serta ditindaklanjuti sebagai salah satu data yang dapat digunakan untuk perencanaan dalam rangka menyongsong program pemerintah di bidang pendidikan menuju Gerakan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan Program Wajib Belajar (Wajar).

### **1.3. Sistematika Penyajian**

Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2016 ini mengulas data pendidikan di Kabupaten Magelang berdasarkan indikator-indikator pendidikan yang terukur. Pendidikan diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan. Pendidikan umum maknanya kurang lebih sama dengan pendidikan formal, maka indikator ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan dasar dimulai dari pendidikan prasekolah (TK) penduduk usia 3-6 tahun dan pendidikan sekolah dasar umur 7-12 tahun serta paket A.
2. Pendidikan menengah yang meliputi pendidikan menengah pertama usia 13-15 tahun baik umum maupun paket B dan menengah lanjutan 16-18 tahun baik umum atau kejuruan maupun paket C.
3. Pendidikan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi maupun akademi dengan usia 19-24 tahun.

Data indikator pendidikan yang disajikan pada publikasi ini bersifat umum, sesuai dengan yang tercakup pada tabel hasil pengolahan yang bersumber dari Susenas.. Data yang disajikan meliputi partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan serta fasilitas sekolah.



## **B A B 2**

# **METODOLOGI**

<https://magelangkab.bps.go.id>

## BAB 2 METODOLOGI

---

### 2.1. Sumber Data

Sumber data utama dari penulisan Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2016 ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 dan 2016. Sumber data yang lain adalah data sekunder dari instansi Kemendiknas yang membawahi sekolah negeri dan Kemenag yang membawahi sekolah swasta, yang meliputi jumlah guru, jumlah murid dan jumlah fasilitas sekolah.

### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Susenas dilakukan dengan mendatangi langsung rumah tangga terpilih dan melakukan wawancara secara langsung antara petugas pencacah dengan responden, melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

## **2.3. Metode Analisis**

Gambaran umum tentang keadaan pendidikan masyarakat disajikan dengan metode analisis sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi ini.

## **2.4. Konsep Definisi**

Konsep, definisi dan penjelasan teknis dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan mempermudah memahami data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini.:

### **2.4.1. Keterangan Pendidikan**

Keterangan pendidikan yang dimaksud meliputi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, dan persentase penduduk yang buta huruf.

Jenjang pendidikan formal terdiri dari :

1. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan

(Termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Paket A dan Paket B.

2. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (a.l. SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas), serta Paket C.
3. Jenjang pendidikan tinggi meliputi:
  - a. Program gelar adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan doktor/strata III (S3).
  - b. Program non-gelar adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I), pendidikan diploma II (D.II), pendidikan diploma III (D.III), pendidikan diploma IV (D.IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2.

## 2.4.2 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

**Tidak/belum pernah bersekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar;

**Masih bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C) yang berada dibawah pengawasan Kemendiknas, Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta;

**Catatan:**

1. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dinyatakan masih bersekolah.
2. Bagi yang sudah diterima namun belum mulai sekolah dinyatakan masih bersekolah.

**Tidak bersekolah lagi** adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C) tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

Catatan: Program Diploma I hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

**Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah

**Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)** adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);

**Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat/kejuruan** adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat {MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama};

**Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA));

**Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik,

Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;

**Program D.I/II** adalah program D.I/II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal;

**Program D.III** adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda

**Program D.IV/S1** adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi;

**S2/S3** adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

**Catatan:**

1. Bagi mereka yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.

Contoh:

- Anak yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.

2. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

### 2.4.3 STTB tertinggi yang dimiliki

**Tidak punya ijazah SD dan sederajat** adalah mereka yang tidak memiliki ijazah SD/MI/Sederajat. Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;

**SD** adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau Paket A1)

**Madrasah Ibtidaiyah (MI)** adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan Sekolah Dasar;

**Paket A** adalah tamat mengikuti ujian Paket A yang diselenggarakan oleh kemendiknas

**SMP Umum/Kejuruan** adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah

Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

**Madrasah Tsanawiyah (MTs)** adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama;

**Paket B** adalah tamat mengikuti ujian Paket B yang diselenggarakan oleh Kemendiknas;

**SMA/ sederajat** adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);

**Madrasah Aliyah (MA)** adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas;

**SMK** adalah tamat sekolah kejuruan setingkat dengan Sekolah Menengah Atas; **Paket C** adalah tamat mengikuti ujian Paket C yang diselenggarakan oleh Kemendiknas;

**Diploma I/II** adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma;

**Diploma III/Sarjana Muda** adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda

pada suatu perguruan tinggi;

**Diploma IV/S1** adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi;

**S2/S3** adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

#### 2.4.4 Angka Melek huruf

**Huruf latin**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin

**Huruf lainnya**, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misal huruf arab, cina dan sebagainya;

**Huruf latin dan huruf lainnya**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

**Tidak dapat membaca dan menulis**, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

**Angka Melek Huruf (AMH)** merupakan tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Di mana AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan. AMH adalah proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya.

**Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS)** adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)

**Tingkat Partisipasi Sekolah** merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.

- Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 7-12 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.
- Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 13-15 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.
- Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 16-18 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)** merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

**Angka Partisipasi Kasar (APK)** merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun

usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

- APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
- APK SLTP merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SLTP) terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
- APK SMU/K merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Menengah Umum/Kejuruan dan sederajat (SMU/K) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

**Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

- APM SD merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun.
- APM SMP merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SLTP) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun.

- APM SMA merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan sederajat (SMA/K) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun.

<https://magelangkab.bps.go.id>



## **B A B 3**

# **PARTISIPASI PENDIDIKAN**

## BAB 3 PARTISIPASI PENDIDIKAN

---

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya anak-anak namun semua orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah misalnya pada tahun 1994 pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Selain itu, pada tahun 2000 pemerintah Indonesia juga mencanangkan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education For All (EFA), sebagai upaya lain dalam meningkatkan pendidikan.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, ayat 3 menyebutkan bahwa wajib

belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan lain yang sederajat. Keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat menengah, dan memperkuat daya saing untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika dewasa.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2016 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, di antaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

### **3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

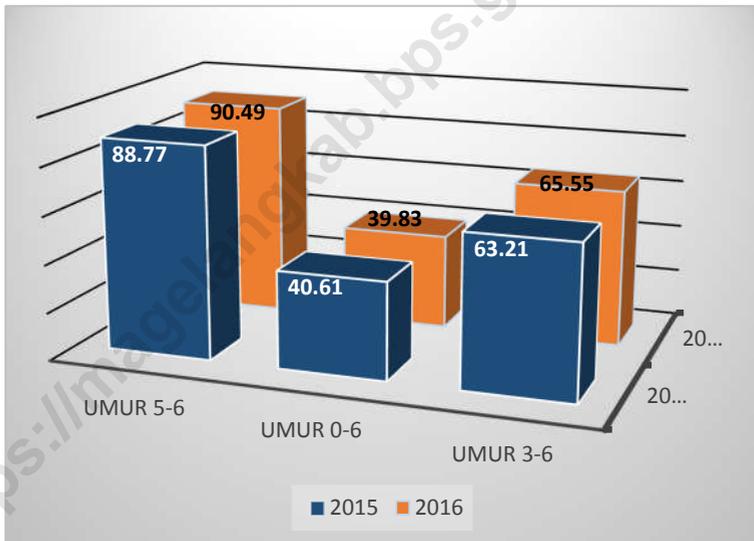
Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu

- Tujuan Utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
- Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus

sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD penyelenggaraannya di beberapa Negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas).



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

Gambar 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016

Data Susenas memperlihatkan bahwa partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan pra sekolah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

(Gambar 3.1). Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 63,21 persen anak usia 3-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 65,55 persen.

Pada kelompok umur 5-6 tahun partisipasi pra sekolah menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 88,77 persen pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 90,49 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Magelang akan pentingnya pendidikan anak usia dini sudah cukup tinggi.

**Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Magelang, 2015-2016**

| Jenis Pendidikan Pra Sekolah        | 2015  | 2016  |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 1                                   | 2     | 3     |
| TK/RA/BA                            | 78.75 | 64.05 |
| Kelompok bermain                    | 7.2   | 12.25 |
| Taman Penitipan Anak                | 11.02 | 22.68 |
| Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Posyandu | 3.03  | 1.02  |
| PAUD Sejenis Lainnya                | 0     | 0     |

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

Tabel 3.1 diatas memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan PAUD yang diikuti anak usia 0-6 adalah Taman Kanak-kanak yaitu sebesar 78,75 persen pada tahun 2015 dan 64,5 persen pada tahun 2016, kemudian diikuti Taman Penitipan Anak sebesar 11,02 persen pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 22,68 persen pada tahun 2016. Jenis pendidikan yang persentasenya juga besar adalah jenis pendidikan Kelompok Bermain dimana pada tahun 2015 sebesar 7,2 persen dan meningkat menjadi 12,25 persen pada tahun 2016. Melihat kenaikan persentase anak umur 0-6 yang sekolah di taman penitipan anak dan kelompok bermain menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak sedini mungkin semakin meningkat, masyarakat semakin sadar bahwa usia emas anak sangat penting.

### **3.2 Partisipasi Sekolah**

Pendidikan merupakan factor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan system pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dari pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk

mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah.

**Tabel 3.2 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**

| Tahun | Jenis Kelamin           | Tidak/Belum Pernah Bersekolah | Masih Sekolah | Tidak Bersekolah Lagi | Total |
|-------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 1     | 2                       | 3                             | 4             | 5                     | 6     |
| 2015  | Laki-laki               | 4,41                          | 23,49         | 72,10                 | 100   |
|       | Perempuan               | 8,96                          | 21,42         | 59,62                 | 100   |
|       | Laki-<br>Laki+Perempuan | 6,67                          | 22,46         | 70,87                 | 100   |
| 2016  | Laki-laki               | 5,25                          | 22,54         | 72,21                 | 100   |
|       | Perempuan               | 6,00                          | 22,12         | 71,88                 | 100   |
|       | Laki-<br>Laki+Perempuan | 5,62                          | 22,33         | 72,05                 | 100   |

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2015 sebesar 6,67 persen dan menurun pada tahun 2016 menjadi 5,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/ tidak menikmati pendidikan.

Menurut jenis kelamin, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah untuk perempuan sebesar 6 persen lebih tinggi daripada penduduk laki-laki yang sebesar 5,25 persen. Pola yang sama untuk tahun 2015 dimana penduduk usia 5 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan lebih banyak persentasenya yang tidak/belum pernah bersekolah dibandingkan penduduk usia 5 tahun ke atas berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 3.3 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**

| Tahun | Kelompok Umur | Tidak/Belum Pernah Bersekolah | Masih Sekolah | Tidak Bersekolah Lagi | Total |
|-------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 1     | 2             | 3                             | 4             | 5                     | 6     |
| 2015  | Umur 7-12     | 0,26                          | 99,74         | 0                     | 100   |
|       | Umur 13-15    | 0                             | 94,08         | 5,92                  | 100   |
|       | Umur 16-18    | 0                             | 63,39         | 36,61                 | 100   |
|       | Umur 19-24    | 0,16                          | 18,00         | 81,84                 | 100   |
| 2016  | Umur 7-12     | 1,82                          | 98,18         | 0                     | 100   |
|       | Umur 13-15    | 0,90                          | 95,65         | 3,45                  | 100   |
|       | Umur 16-18    | 0,81                          | 67,24         | 31,95                 | 100   |
|       | Umur 19-24    | 0,16                          | 18,00         | 81,84                 | 100   |

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

Faktor demografis lain yang berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan adalah umur. Semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) pada tahun 2016 sebesar 98,18 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 95,65 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 67,5 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 21,59 persen. Untuk tahun 2015 polanya cenderung sama dengan tahun 2016 dimana semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya.

Tabel 3.3 juga menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Pada tahun 2015 sebanyak 0,26 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan sebesar 1,82 persen pada tahun 2016. Pada kelompok usia 13-15 tahun sebesar 0 persen pada tahun 2015 dan sebesar 0,90 persen pada tahun 2016.

### **3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu atau angka partisipasi sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap system pendidikan terhadap penduduk usia

sekolah. Secara statistik APS adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya.

$$APS\ 7-12\ tahun = \frac{\text{Jml pddk yg masih sekolah usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15 tahun, 16-18 dan 19-24 tahun)

**Tabel 3.4 APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**

| Tahun | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1     | 2             | 3         | 3         | 4                   |
| 2015  | Umur 7-12     | 99,52     | 100       | 99,74               |
|       | Umur 13-15    | 93,79     | 94,37     | 94,08               |
|       | Umur 16-18    | 64,08     | 62,57     | 63,39               |
|       | Umur 19-24    | 20,58     | 15,51     | 18,00               |
| 2016  | Umur 7-12     | 96,88     | 99,56     | 98,18               |
|       | Umur 13-15    | 96,28     | 94,96     | 95,65               |
|       | Umur 16-18    | 68,44     | 65,93     | 67,24               |
|       | Umur 19-24    | 10,49     | 18,80     | 14,70               |

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

Berdasarkan data Susenas 2015-2016, secara umum, APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun relatif tinggi, lebih dari 95 persen. Meskipun APS pada kelompok umur 7-12 tahun merupakan APS tertinggi jika dibandingkan kelompok umur yang lain, yaitu 98,18 persen, akan tetapi persentase pada kelompok umur tersebut justru mengalami penurunan sebesar 1,56 poin jika dibandingkan 2015. Tercatat pula, bahwa selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan APS di Kabupaten Magelang pada kelompok umur 13-15 tahun, yang mencapai 95,65 persen. Hal ini berarti masih terdapat 4,35 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Tingginya APS pada kedua kelompok umur, 7-12 tahun dan 13-15, dalam bersekolah bisa jadi sebagai dampak positif adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun yang sudah dilaksanakan selama dua dekade terakhir.

Seiring dengan pencapaian tersebut, APS untuk kelompok umur 16-18 tahun juga mengalami peningkatan dibandingkan 2015, sebesar 3,85 poin, menjadi 67,24 persen. Walaupun belum sebesar APS 7-15 tahun, namun hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan, sampai dengan pendidikan menengah ke atas semakin dapat dinikmati dan dijangkau oleh sebagian besar masyarakat.

Kondisi berbeda ditunjukkan pada kelompok umur 19-24 tahun. Pada kelompok umur tersebut, APS 2016 turun 3,30 poin, dari 18 persen pada 2015 menurun menjadi 14,70 persen. Penurunan pada kedua kelompok umur ini salah satunya disebabkan rendahnya APS penduduk laki-laki, yang hanya sebesar 10,49 persen, sedangkan APS perempuan mencapai 18,80 persen. Pola APS yang

masih pasang surut di beberapa kelompok umur menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk dapat memberikan akses pendidikan yang layak dan merata serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat pada semua jenjang pendidikan.

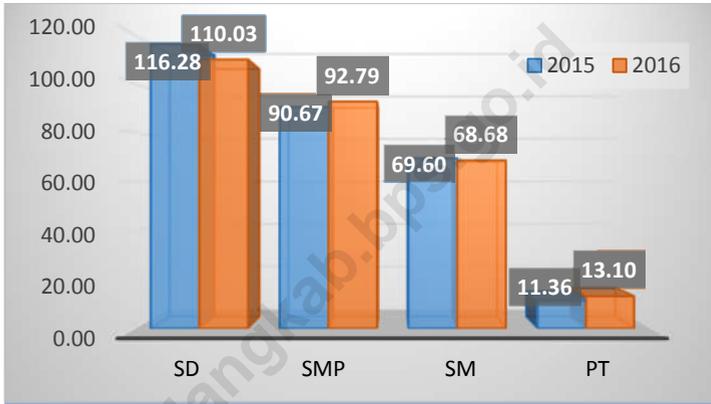
Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses, maupun kemampuan akademis.

### **3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan adanya siswa dengan umur lebih tua maupun umur muda dibanding umur standar di jenjang pendidikan tersebut. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang

duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda.

**Gambar 3.2 Angka Partisipasi Kasar  
Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

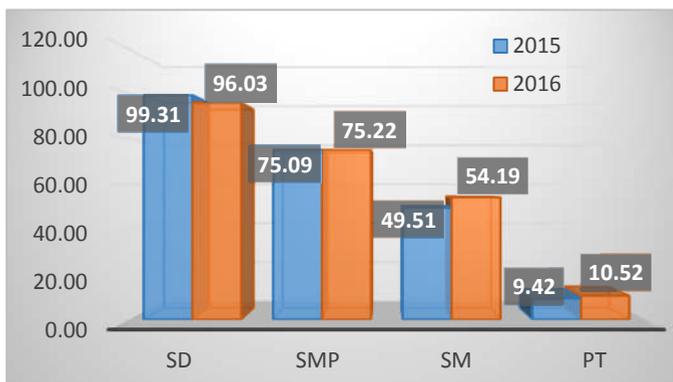
Berdasarkan gambar 3.2 dalam kurun waktu 2015-2016, angka partisipasi kasar Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan di jenjang pendidikan SMP dan PT, sedangkan jenjang pendidikan untuk sekolah dasar dan Sekolah Menengah (SM) mengalami penurunan yang cukup signifikan. APK SD/MI tahun 2015 sebesar 116,28 persen meningkat ditahun 2016 menjadi 110,03 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, APK sebesar 90,67 persen ditahun 2015 meningkat menjadi 92,79 persen ditahun 2016. Sedangkan APK untuk tingkat Sekolah Menengah (SM) mengalami penurunan sebesar 69,6 persen ditahun 2015 menjadi 68,68 persen ditahun 2016. Angka partisipasi Kasar untuk jenjang Perguruan Tinggi justru mengalami peningkatan yang

cukup significant, pada tahun 2015 APK Perguruan Tinggi sebesar 11,36 persen menjadi 13,10 persen ditahun 2016.

### 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

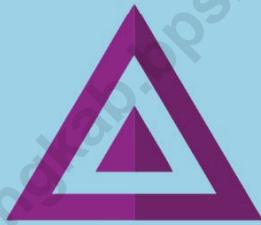
Selain APS, indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan. Pengukuran APM bertujuan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jika APM 100, berarti seluruh penduduk pada kelompok umur tertentu seluruhnya sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umur (bersekolah tepat waktu).

**Gambar 3.3. Angka Partisipasi Murni Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

Dalam kurun waktu 2015-2016 APM di Kabupaten Magelang menunjukkan penurunan pada jenjang pendidikan SD/MI Sederajat sedangkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sampai dengan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan. Angka partisipasi sekolah untuk SD/MI menurun yaitu dari 99,31 persen di tahun 2015 menjadi 96,03 persen ditahun 2016. Sedangkan angka partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 75,09 persen menjadi 75,22 persen. Pada tingkat SMU/MA, angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan juga dari 49,51 persen ditahun 2015 menjadi 54,19 persen ditahun 2016. Angka partisipasi sekolah pada tingkat Perguruan Tinggi juga mengalami peningkatan 9,42 persen ditahun 2015 menjadi 10,52 persen ditahun 2016.



## **B A B 4**

# **PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**

## BAB 4 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

---

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sector pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bias tergantikan oleh sektor manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak Negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indicator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

## 4.1 Angka Melek Huruf

Melek aksara (juga disebut melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin atau huruf lainnya dalam kegiatannya.

Di dunia internasional salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Angka melek huruf merupakan salah satu variable dalam menentukan indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan program Keaksaraan Fungsional (KF) yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995.

**Gambar 4.1.**  
**Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas**  
**Di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

Kondisi keaksaraan di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Gambar 4.1 yang menyajikan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas . Dari gambar 4.1 tersebut terlihat bahwa persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 95,26 pada tahun 2015, dan mengalami penurunan sebesar 0,42 persen menjadi 94,84 persen pada tahun 2016.

**Tabel 4.1.**  
**Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Magelang**  
**Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2015-2016**

| Tahun | Tipe Daerah/<br>Jenis Kelamin | Kelompok Umur  |                |              |              |
|-------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|       |                               | 15-24<br>tahun | 25-44<br>tahun | 15+<br>tahun | 45+<br>tahun |
| 1     | 2                             | 3              | 4              | 5            | 6            |
| 2015  | Laki-laki                     | 100            | 99,73          | 97,83        | 95,12        |
|       | Perempuan                     | 100            | 99,89          | 92,73        | 83,10        |
|       | Laki-<br>laki+Perempuan       | 100            | 99,81          | 95,26        | 89,04        |
| 2016  | Laki-laki                     | 99,74          | 100,00         | 97,18        | 93,39        |
|       | Perempuan                     | 100,00         | 99,92          | 92,52        | 83,05        |
|       | Laki-<br>laki+Perempuan       | 99,87          | 99,96          | 94,84        | 88,08        |

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

Kondisi keaksaraan di Kabupaten Magelang tahun 2015-2016, secara rinci ditunjukkan pada Tabel 4.1. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa di Kabupaten Magelang, proporsi angka melek huruf penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Angka melek huruf penduduk laki-laki 15 tahun ke atas adalah 97,18 persen, sedangkan perempuan 92,52 persen. Pola yang sama untuk tahun 2015.

Kendati angka melek huruf penduduk perempuan berusia 15-24 tahun mencapai 100 persen, namun rendahnya angka melek huruf penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas tersebut lebih dipengaruhi oleh

rendahnya angka melek huruf penduduk perempuan di kelompok umur 45 tahun ke atas, yang hanya 83,05 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada penduduk laki-laki. Angka melek huruf laki-laki pada kelompok umur 45 tahun ke atas juga paling rendah di antara kelompok umur yang lain, yaitu 93,39 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2015. Secara Umum pada tahun 2016 angka melek huruf setiap kelompok umur mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015.

Salah satu target SDGs adalah menjamin pada tahun 2016 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Salah satu indicator yang digunakan untuk memantau pencapaian tersebut adalah angka melek huruf penduduk 15-24 tahun. Jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, angka melek huruf kelompok umur 15-24 tahun cenderung lebih tinggi. Angka melek huruf umur 15-24 tahun pada tahun 2016 mencapai 99,96 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 99,81 persen (Tabel 4.1).

## **4.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah**

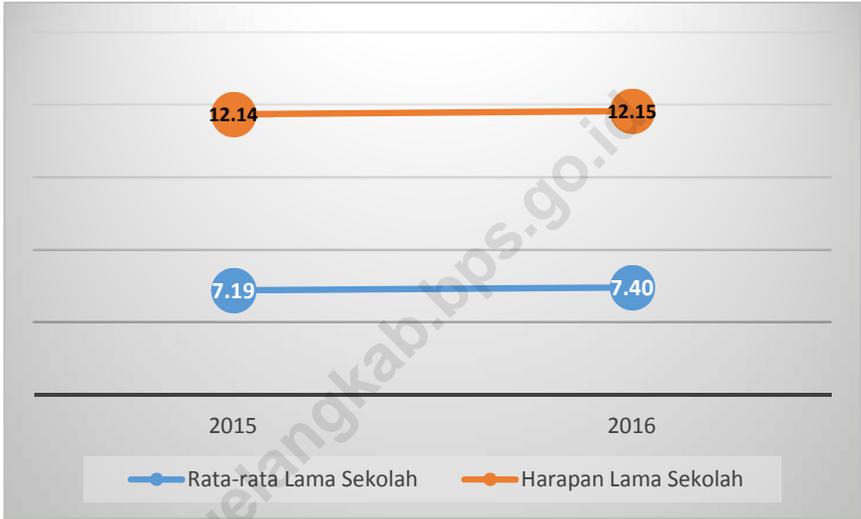
Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pembentuk indicator IPM ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

**Gambar 4.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**



Sumber: BPS Kabupaten Magelang

Pada kurun waktu 2015 hingga 2016, angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang meningkat sebesar 0,01 persen menjadi 12,15 pada tahun 2016. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang memberi sinyal positif, bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi. Di tahun 2016, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang telah mencapai 12,15, yang artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Sejalan dengan pencapaian angka Harapan Lama Sekolah, pertumbuhan positif juga dicapai oleh angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka rata-rata lama

sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sebesar 7,19 meningkat menjadi 7,40 pada tahun 2016. Dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang sebesar 7,40 persen pada 2016, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang usia 25 tahun ke atas hampir mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara dengan SMP kelas II. Hal ini bisa diharapkan sebagai modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Magelang yang lebih baik.

### **4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi, cenderung mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan atau keahlian, akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

**Tabel 4.2 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**

| Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan | 2015      |           |                      | 2016      |           |                      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|
|                                      | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki +Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki +Perempuan |
| 1                                    | 2         | 3         | 4                    | 5         | 6         | 7                    |
| Tidak/Belum Pernah Sekolah           | 1,61      | 8,16      | 4,92                 | 2,05      | 4,42      | 3,24                 |
| Belum Tamat SD/MI                    | 18,08     | 18,76     | 18,42                | 14,29     | 16,60     | 15,45                |
| SD/MI                                | 33,61     | 31,22     | 32,40                | 38,86     | 41,51     | 40,19                |
| SMP/MTs                              | 19,29     | 18,74     | 19,01                | 10,40     | 14,61     | 12,51                |
| SMA/SMK/MA                           | 22,51     | 17,61     | 20,04                | 28,76     | 16,44     | 22,57                |
| Perguruan tinggi                     | 4,89      | 5,52      | 5,21                 | 5,65      | 6,43      | 6,04                 |

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2015-2016)

Tabel 4.2 menggambarkan komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin berdasarkan hasil Susenas. Menarik untuk dicermati, bahwa tren penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan setingkat SMP/MTs justru mengalami penurunan. Kendati menurun 6,5 persen menjadi 12,51 persen pada tahun 2016, namun penurunan angka tersebut diimbangi dengan meningkatnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan hingga SMA/ sederajat ke atas.

Penduduk di Kabupaten Magelang yang mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/ sederajat ke atas mengalami peningkatan jika dibandingkan 2015 sebesar 3,36 persen menjadi 28,61 persen pada tahun 2016, dengan rincian 22,57 persen tamat SMA/ sederajat dan 6,04 persen tamat perguruan tinggi. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2016 persentase penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA sederajat ke atas lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Tercatat pada 2016, persentase penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA sederajat ke atas sebesar 34,41 persen lebih tinggi dari persentase penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA sederajat ke atas yang hanya 22,87 persen.

Untuk persentase penduduk umur 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang kurang dari SMA sederajat (tidak/belum pernah sekolah, belum tamat SD/MI, SD/MI dan SMP/MTs) pada tahun 2016 sebesar 65,59 persen untuk penduduk Laki-laki dan 77,13 persen untuk penduduk perempuan. Terlihat bahwa masih banyak penduduk perempuan yang ber umur 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya masih rendah, dari 77,13 persen tersebut sebesar 14,61 persen pendidikan tertingginya SMP/MTs, 41,51 persen pendidikan tertingginya SD/ sederajat dan sisanya 21,02 persen belum tamat SD maupun tidak/belum pernah sekolah.



## **B A B 5**

# **SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

A graphic consisting of three overlapping rectangular boxes with a blue border, arranged in a slightly offset, stacked manner. The text is centered within the top-most box.

## BAB 5 SARANA DAN PRASARANA

---

Kebijakan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain jumlah fasilitas pendidikan, jumlah tenaga guru, rasio murid guru, rasio guru sekolah, dan rasio murid guru. Jumlah sekolah, guru dan murid yang dicakup di sini adalah sekolah jenjang pendidikan SD,SMP,SMA

baik negeri maupun swasta yang berada dibawah Kemendiknas dan Kemenag dan data yang digunakan bersumber dari kedua instansi tersebut.

## **5.1 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Guru**

Semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat di bidang pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan hendaknya diiringi dengan meningkatnya fasilitas pendidikan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan ketersediaan sekolah, terutama mengenai daya tampung ruang kelas sehingga program peningkatan kualitas manusia di bidang pendidikan dapat berjalan lancar. Di samping itu, kualitas dan kuantitas guru juga berperan dalam hal membangun kualitas pendidikan.

Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu prasyarat awal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk mendapatkan gambaran kondisi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, agar kebijakan di bidang pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana dapat lebih tepat arah dan tepat sasaran

**Tabel 5.1 Jumlah Sekolah, Murid, Guru  
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**

| Pendidikan | Tahun | Sekolah | Murid   | Guru  |
|------------|-------|---------|---------|-------|
| 1          | 2     | 3       | 4       | 5     |
| SD/MI      | 2015  | 916     | 123.511 | 9.004 |
|            | 2016  | 916     | 123.515 | 8.900 |
| SMP/MTs    | 2015  | 195     | 51.318  | 3.956 |
|            | 2016  | 198     | 51.684  | 3.870 |
| SMA/SMK/MA | 2015  | 97      | 32.163  | 2.683 |
|            | 2016  | 97      | 33.651  | 2.715 |

Sumber: Kemendiknas dan Kemenag

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel 5.1. Pada tahun 2016, jumlah sekolah SD/MI (negeri dan swasta) sebanyak 916 sekolah dengan murid sebanyak 123.515 siswa dan guru sebanyak 8.900 orang, jumlah sekolah SMP/MTs (negeri dan swasta) sebanyak 198 sekolah dengan murid sebanyak 51.684 dan guru sebanyak 3.870, dan jumlah sekolah SMA/K (negeri/swasta) sebanyak 97 sekolah dengan murid sebanyak 33.651 murid dan guru sebanyak 2.715 guru. Pada tahun 2016 jumlah sekolah SMP mengalami peningkatan dari tahun 2015, sedangkan jumlah sekolah SD dan SMA tetap tidak mengalami perubahan.

## 5.2 Rasio Sekolah Guru, Sekolah Murid, dan Guru Murid

Indikator jumlah sekolah, jumlah guru maupun jumlah murid tentu saja tidak cukup mempunyai arti jika hanya berupa penjumlahan. Pada gambar 5.1 berikut akan ditampilkan rasio guru-murid, rasio sekolah-murid dan rasio sekolah-guru.

Rasio guru-murid adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Rasio sekolah-murid adalah Rasio murid per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antar jumlah murid dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di suatu daerah.. Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan sekolah makin tinggi. Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin kurang jumlah sekolahnya.

Rasio sekolah-guru adalah Rasio Tenga pengajar per Sekolah didefinisikan

sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.

**Tabel 5.2 Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016**

| Pendidikan | Tahun | S/G  | S/M   | G/M  |
|------------|-------|------|-------|------|
| 1          | 2     | 3    | 4     | 5    |
| SD/MI      | 2015  | 1:10 | 1:135 | 1:14 |
|            | 2016  | 1:10 | 1:135 | 1:14 |
| SMP/MTs    | 2015  | 1:20 | 1:263 | 1:13 |
|            | 2016  | 1:20 | 1:261 | 1:13 |
| SMA/SMK/MA | 2015  | 1:28 | 1:332 | 1:12 |
|            | 2016  | 1:28 | 1:347 | 1:12 |

Sumber: Kemendiknas dan Kemenag

Keretangan: S/G= Rasio Sekolah-Guru

S/M= Rasio Sekolah Murid

G/M= Rasio Guru Murid

Selama 2 tahun terakhir, rasio guru murid untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA relatif stabil, pada tahun 2016, rasio SD/MI adalah 14, artinya setiap 1 orang guru mengampu 14 murid SD/MI. Rasio SMP/MTs sebesar 13, artinya setiap 1 orang guru mengampu 13 murid, dan

rasio SMA/SMK/MA sebesar 12, artinya 1 orang guru mengampu 12 murid. Keadaan di atas menunjukkan bahwa seorang guru di tingkat SD melayani siswa lebih banyak dibanding dengan guru yang bertugas di SMP atau di SMA.

Dari Tabel 5.2 terlihat, pada tahun 2016 rata-rata setiap sekolah terdapat 10 guru pada jenjang sekolah SD/ sederajat, 20 guru pada jenjang sekolah SMP/ sederajat dan 28 guru pada jenjang pendidikan sekolah SMA/ sederajat. Rasio sekolah guru apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan untuk semua jenjang pendidikan

Untuk rasio sekolah murid pada tahun 2016 setiap sekolah rata-rata menampung sebanyak 135 murid pada jenjang SD/ sederajat, 261 murid pada jenjang SMP/ sederajat, dan 347 murid pada jenjang SMA/ sederajat. Besarnya rata-rata murid tiap sekolah pada tahun 2016 setiap jenjang pendidikan apabila dibandingkan tahun 2015 untuk jenjang SD/ sederajat stabil, untuk jenjang SMP/ sederajat mengalami penurunan dan untuk jenjang SMA/ sederajat yang mengalami peningkatan .



**PENUTUP**

<https://magelangkab.go.id>

## PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang Profil Pendidikan Kabupaten Magelang tahun 2016 yang telah disajikan, maka dapat dirangkum beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan masa keemasan anak (*the gold age*), Partisipasi PAUD untuk anak umur 3-6 tahun di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 sebesar 65,55 persen.
2. Nilai APS di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 untuk kelompok umur 7-12 sebesar 98,18 dan APS untuk Kelompok umur 13-15 sebesar 95,65. Tingginya APS pada kedua kelompok umur tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun.
3. Terdapat 58,88 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya tamat SD ke bawah. Ini menunjukkan bahwa hampir separo lebih penduduk Kabupaten Magelang masih berpendidikan rendah.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGELANG**  
Jl. Soekarno - Hatta No.4 Telp./Fax.(0293) 788143, Kota Mungkid 56511  
E-Mail : bps3308@bps.go.id, Homepage <http://magelangkab.bps.go.id/>